



# Demokrasi Dan Pandemi

Bunga Rampai Pengetahuan Masyarakat Sipil di Indonesia

# DEMOKRASI DAN PANDEMI

Bunga Rampai Pengetahuan Masyarakat Sipil di Indonesia

Editor: Lies Marcoes, Lisistrata Lusandiana, Naomi Srikandi



Diterbitkan oleh: Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara

# KOLOFON

## DEMOKRASI DAN PANDEMI

Bunga Rampai Pengetahuan Masyarakat Sipil di Indonesia

Diterbitkan oleh: Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara

ISBN 978-623-98039-0-2

© 2021

Dipublikasikan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional (CC-BY-NC-SA 4.0)

Buku ini terbit atas inisiatif dan kerja sama yang telah dilakukan beberapa organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam CIVICA.

### Penulis:

Ade Wahyudin, S.H.I. | Adnan Topan | Ahmad Rifai | Akhmad Misbah Hasan | Akmaluddin Rachim | Amelia Fauzia | Amelia Hapsari | Arif Nurdiansah | Asep Kurniawan | Asrul Aziz Sigalingging | Benedikta Atika | Cecep Kodir Jaelani | Cici Meilana Zaita | Citra Hasan Nasution | Dewi Candraningrum | Dian Herdiany | Fadilla D. Putri | Fildzah Husna | Fransisca Ria Susanti | Gladi Hardiyanto | Gusnita Linda | Halili Hasan | Hardiwan Prayoga | Herawati | Herni | Ramdlaningrum | Ihsan Ali Fauzi | Ika K. Idris | Krisnawan Wisnu | Laili Khairnur | Lian Gogali | Lies Marcoes | Lisistrata Lusandiana | Luna Kharisma | M. Zuhdi | Misbah Hasan | Mohammad Reza | Naomi Srikandi | Nurasih Jamil | Oming Putri | Panji Tirta Nirwana Putra | Pipit Purwadi | Prodita Sabarini | Rachma Safitri | Rezky Chiki | Saskia Tjokro | Sayyidatul Insiyah | Setyo Dwi Herwanto | Sri Hidayati | Sukma Smita | Suraji | Yayan Hidayat | Zahra Amin.

Koordinator Program: Eni Mulia

Editor: Lies Marcoes, Lisistrata Lusandiana, Naomi Srikandi

Penyelaras Bahasa: Anne Shakka, Damianus Guruh, Fairuzul Mumtaz.

Penerjemah: Translexi

Proofreader: Lusia Neti Cahyani

Desain Sampul dan Isi: MM Biro Disain

Desain sampul merupakan apropriasi dari lukisan berjudul "Pericles' Funeral Oration", karya Philipp Foltz.

Buku elektronik ini dipublikasikan di bawah lisensi CC-BY-NC-SA 4.0. Anda dapat menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk format apapun. Anda juga dapat mengubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini, selama anda mencantumkan nama yang sesuai, mencantumkan tautan terhadap lisensi, dan menyatakan bahwa telah ada perubahan yang dilakukan. Anda dapat melakukan hal ini dengan cara yang sesuai, namun tidak mengisyaratkan bahwa pemberi lisensi mendukung Anda atau penggunaan Anda. Anda tidak dapat menggunakan materi ini untuk kepentingan komersial. Apabila anda mengubah, mengubah, atau membuat turunan dari materi ini, Anda harus menyebarluaskan kontribusi Anda di bawah lisensi yang sama dengan materi asli.



---

Kolofon

---

Daftar isi

---

---

## **REGRESI DEMOKRASI**

---

Meliput COVID-19, Menjaga Demokrasi

Pandemi dan Masa Depan Jurnalisme

Potret Demokrasi Konstitusional  
dalam UU Minerba dan Implikasinya  
Terhadap Tata Kelola Pertambangan

Pandemi dan Regresi Partisipasi:  
Refleksi atas Politik Legislasi  
dan Peran Masyarakat Sipil

APBN dan Masa Depan Ekonomi  
Hijau di Tengah Pandemi

Pandemi, Kemunduran Demokrasi,  
dan Tantangan Gerakan Antikorupsi

Pandemi dan Bantuan Hukum Digital

Narasi Pandemi di Ruang Publik  
Baru Asia Tenggara: Di Antara Kisah  
Kepahlawanan dan Kampanye Anti-China

Mengembalikan Khittah Masyarakat Sipil

Memperjuangkan Kesejahteraan  
Melalui Pajak yang Berkeadilan

Dinamika Politik Hukum Perhutanan  
Sosial, Dinamika Perebutan Ruang

## PANDEMI DAN KOLABORASI

Advokasi Kebijakan Seni dalam 13 Inci

Menggalang Modal Selama Pandemi:  
Kacamata Katalis Kewirausahaan ANGIN

Lokadaya: Meningkatkan Resiliensi  
Organisasi dalam Menghadapi Pandemi

Melawan Covid-19 di Negeri  
Seribu Masjid: Memupuk Masa  
Depan melalui Kebun Pangan

Partisipasi Publik dan Semangat  
Filantropi di Era Pandemi

Desa Terlibat dalam Penargetan  
Bantuan Sosial, Mengapa Tidak?  
Pembelajaran dari Pelaksanaan BLT DD

Merekam Solidaritas, Memperlebar Ruang  
Publik: Catatan tentang Video Dokumenter  
'Keragaman di Tengah Corona'

Remaja, Pandemi, dan Ruang  
Belajar Menuju Normal Baru

Kebijaksanaan dalam Himpitan Krisis:  
Belajar dari Umme dan Belale'

Akar Rumput di Masa Pandemi:  
Narasi Gerakan dan Ketahanan  
Masyarakat Sipil dalam Mendorong  
Ruang-Ruang Inklusif di Kota

Bukan Cuma Menambal tetapi  
Membangun dengan Cara Pandang  
Baru: Melihat Kembali Ekosistem Film  
Dokumenter setelah COVID-19

Membicarakan Kedaulatan  
di Tengah Pandemi

Memupuk Pertumbuhan Bersama dengan  
Program Ekonomi Lokal yang Inklusif

## REFLEKSI DAN PENGETAHUAN TERSITUASI

Lansia, Gender, dan Covid-19:  
Catatan Dua Lansia

Ingatan yang Utuh, Pengetahuan  
yang Mengganggu

Beradaptasi dengan Pandemi,  
Cerita Tiga Negeri

Napas Pelayanan dalam Kerja  
Pendampingan Pipit Purwadi

Mimpi-Mimpi Maulani Agustiah  
Rotinsulu: Etika Perawatan dan  
Inklusi dalam Feminisme

Media Mubadalah dan Tafsir  
Ulang Konsep Relasi Gender

Menenun Kembali Kejayaan  
Kopi Tuang Manggarai

Seni, Demokrasi, dan  
Pengetahuan Sehari-hari I

Seni, Demokrasi, dan  
Pengetahuan Sehari-hari II

# Merekam Solidaritas, Memperlebar Ruang Publik: Catatan tentang Video Dokumenter 'Keragaman di Tengah Corona'

Ihsan Ali-Fauzi

Pada 23 Mei 2020, sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri 2020, kantor kami PUSAD Paramadina meluncurkan video dokumenter berjudul 'Cerita Pandemi: Keragaman di Tengah Corona'. Pesan-pesan video itu cukup jelas andaipun penonton tidak mengerti bahasa dalam percakapan di sana atau bahkan jika penonton tidak bisa mendengar sama sekali. Gambar-gambar berjalannya menjadi medium pembawa pesan-pesan itu: orang-orang mengenakan masker dan menjaga jarak, menandakan situasi yang tidak normal, dan mereka bekerja membagi-bagikan kardus makanan atau mempersilakan lewatnya sebuah mobil ambulans. Bagi warga negara Indonesia yang bisa memahami percakapan di sana, juga mengerti garis besar konteksnya, pesan-pesan itu mestinya bisa ditangkap lebih jelas: mereka yang bergiat dalam video itu mewakili individu atau kelompok lintas iman; mereka yang bergiat bisa siapa saja karena modal yang diperlukan untuk itu tak lebih dari kehendak untuk menanggung beban bersama; dan mereka yang dibantu bisa siapa saja yang rentan akibat tekanan pandemi Covid-19. Di tengah kedaruratan seperti ini, meski siapa saja bisa menjadi rentan, siapa saja juga bisa mengulurkan tangan membangun solidaritas.

Video dokumenter itu salah satu hasil kerja sama PUSAD Paramadina dengan Narasi. Narasi adalah lembaga yang didirikan pada 2017 antara lain oleh jurnalis televisi Najwa Shihab dan memproduksi acara Mata Najwa. Selain mengunggahnya di kanal khusus Narasi dan YouTube, kami juga mengajak sebanyak mungkin peminat untuk menonton video itu dan mendiskusikannya secara daring. Video itu juga kami gunakan sebagai bahan diskusi dalam beberapa kegiatan lokakarya tentang mediasi konflik dan melawan disinformasi yang kami lakukan beberapa bulan terakhir secara luring di sejumlah lokasi, sambil menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Mengapa kami membuat video itu di tengah situasi yang serba tidak mudah karena pasti semua pekerjaan dilakukan orang per orang dan kerja bersama berlangsung hanya secara daring akibat diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)? Apa harapan yang hendak kami tebar kepada publik lewat pesan-pesan dalam video itu? Apa maknanya bagi perluasan ruang-ruang publik kita sekarang, yang oleh banyak pihak disebut-sebut sudah makin menyempit antara lain karena disinformasi lewat media sosial makin mempertajam polarisasi yang sudah ada?

Dengan membuat video itu, kami ingin merekam berlangsungnya solidaritas kemanusiaan lintas iman yang *justru* terjadi karena pandemi. Solidaritas itu memungkinkan terjadinya kerja sama di antara berbagai kelompok agama yang berbeda, yang melampaui sekadar toleransi di antara mereka. Lebih khusus, kami sengaja menampilkan peran perempuan di sana, sebagai kritik internal dan sekaligus pengingat agar kita wajib lebih banyak lagi menghargai upaya dan jasa mereka serta mendengar suara mereka. Kami juga sengaja menampilkan seorang perempuan keturunan Tionghoa dalam video itu untuk menggambarkan realitas yang tak mengada-ada tentang peran dan sumbangan mereka di tengah-tengah kita. Peran dan sumbangan mereka sering diabaikan akibat bias etnis, agama, dan gender. Upaya itu kami lakukan sambil bertobat dari stigmatisasi yang sering kita lakukan sebagai bangsa terhadap mereka.

Melalui bahasa gambar berjalan yang mudah dicerna, kami ingin memanfaatkan kekuatan narasi (cerita) tentang individu-individu yang berbuat sesuatu di tengah kesulitan. Sekecil apa pun peran dan dampaknya. Dengan begitu, kami berharap bisa mengundang lebih banyak pimpinan komunitas dan publik pada umumnya untuk beraksi bersama meningkatkan solidaritas. Kami yakin dengan cara-cara seperti itulah demokrasi kita bukan saja bisa bertahan, tetapi juga meningkatkan kualitasnya.

### **Merekam Solidaritas Lintas Iman**

Video dokumenter pendek ini berdurasi hanya sekitar sembilan menit. Kisah-kisah baik ini bercerita tentang peran aktor-aktor agama di tengah ancaman Covid-19. Kami harapkan kisah-kisah itu bisa menginspirasi. Lebih detailnya, ada tiga kisah solidaritas lintas iman yang *justru* terjadi akibat tekanan pandemi.

Kisah pertama tentang warung kerukunan yang dikelola Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi DKI Jakarta. Ini adalah satu di antara sekitar 540-an forum lintas iman yang sudah berdiri di hampir semua provinsi dan kota/kabupaten di seluruh Indonesia (lihat Tim PUSAD Paramadina 2020). Di balik kisah itu, ada perencanaan untuk bekerja bersama-sama, misalnya dalam mendanai dan menyiapkan secara teknis makanan yang akan didonasikan, mengontak pimpinan lingkungan setempat untuk memilih warung yang cocok, dan memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam kegiatan itu akan mengikuti protokol kesehatan. Semuanya diawali inisiatif membantu meringankan beban orang lain secara lintas iman. "Bekerja sendiri-sendiri dan bekerja bersama-sama," kata perempuan penganut Konghucu yang menjadi salah satu pengurus FKUB Jakarta dalam film itu, "beda banget!"

Kisah kedua bercerita tentang kerja sama beberapa tokoh atau organisasi lintas iman dalam mengumpulkan dan menyalurkan donasi terkait Covid-19. Kegiatan ini berlangsung di Jakarta dan antara lain dikoordinasikan oleh Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), satu lembaga lintas iman yang kini dipimpin pemikir agama dan tokoh perempuan Siti Musdah Mulia. Hal ini juga diawali keyakinan para pegiatnya bahwa selain memiliki dimensi ibadat, semua agama juga memiliki dimensi sosial. Mereka juga yakin bahwa donasi harus diberikan kepada siapa saja, terlepas dari apa agama atau suku seseorang. Sebab, Covid-19 juga tidak memilih korban berdasarkan identitas-identitas. Seorang pendeta dalam kisah itu menyebutkan, "Pandemi ini tidak memandang (korban) agama apa pun, status ekonomi apa pun, budaya apa pun, semua (orang bisa) mengalaminya."

Akhirnya, kisah ketiga bercerita tentang komunitas Kristen di Maluku yang mendoakan seorang perawat yang harus dibawa mobil ambulans karena sakit. Percakapan di antara dua orang berbeda agama saat itu, yang berlangsung di pinggir jalan, menunjukkan sikap saling percaya (*trust*) di antara mereka. Permintaan bapak pendeta agar dia dan jamaahnya bisa mendoakan secara Kristen kesembuhan sang perawat, yang seorang muslimah berjilbab, segera diperbolehkan sang ibu. Mungkin ini tidak biasa terjadi dalam situasi normal, tetapi ancaman Pandemi Corona *mengharuskannya* terjadi.

Kisah-kisah itu kami angkat karena menunjukkan solidaritas kemanusiaan kita, yang menyatukan kita di tengah berbagai perbedaan. Kemendesakan untuk saling membantu dan bersolidaritas itu terasa meningkat karena kehadiran pandemi sebagai ancaman bersama. Kata penyair Theodore Roethke, "*In a dark time, the eye begins to see.*" Dalam gelaplah justru mata kita mulai bisa melihat.

Dengan begitu, pesan video ini juga ingin menebar harapan di tengah kecemasan dan ketakutan. Perasaan tidak berdaya di hadapan ancaman pandemi bisa dan sering membuat kita putus asa. Dalam situasi itu, sangat masuk akal jika kita berpaling kepada kekuatan adikodrati di atas sana, yang kita sebut dengan nama Allah atau nama-nama lainnya, apalagi jika kita seseorang yang religius. Tetapi di luar itu, dan yang tidak bertentangan dengan perintah-Nya atau bahkan dianjurkan-Nya, kita juga bisa berpaling kepada sesama kita, meskipun kita berbeda secara agama atau apa saja.

Bagi kami, aksi-aksi solidaritas di atas bahkan melampaui sekadar toleransi, yang akar katanya dalam Bahasa Latin, *tolerare*, mengandung makna kesediaan menanggung *beban* kehadiran orang lain yang berbeda dari kita (karena kita, sebaliknya secara timbal balik, juga berharap bisa diterima oleh orang lain itu). Dalam aksi solidaritas di atas, tidak ada beban apa-apa yang ditanggung, kecuali mungkin kegembiraan yang bertambah.

Sudah terlalu sering aktor-aktor agama disudutkan sebagai akar penyebab banyak masalah: dari merebaknya ujaran kebencian, 'preman bersorban', hingga terorisme. Di beberapa tempat, Covid-19 juga disebut-sebut disebarkan aktor-aktor agama yang tidak mau mendengar nasihat sains. Mereka mulai didesas-desuskan sebagai pembawa laknat, bukan rahmat.

Aktor-aktor agama tentu bisa (dan perlu) membela diri dari tuduhan-tuduhan itu, dengan beragam cara. Tetapi, cara paling efektif menurut kami adalah dengan menunjukkan langsung wajah positif agama. Apalagi jika hal itu dilakukan di tengah ancaman pandemi seperti Covid-19 ini. Kata satu pepatah Arab, "*Lisan al-hal afshah min lisan al-maqal.*" Bahasa perbuatan itu lebih kuat pengaruhnya dari bahasa omongan.

Pesan-pesan dalam video dokumenter ini menunjukkan tidak adanya benturan antara kebenaran sains dan kebenaran agama, sekalipun kita tahu dalam kenyataannya ada kelompok-kelompok agama di tengah kita yang mempertentangkan kedua kebenaran itu (Mietzner, 2020). Pesan-pesan itu juga menunjukkan kerja sama di antara kelompok-kelompok agama, meskipun kita tahu ada orang atau kelompok agama yang menolak kerja sama seperti itu bahkan dalam situasi yang normal. Semuanya memperlihatkan adanya pilihan-pilihan yang sengaja diambil dan kesediaan untuk bekerja bersama-sama.

Sayangnya, pilihan-pilihan seperti itu tidak diambil sebagai aksi oleh para pemimpin politik kita dalam menangani krisis akibat Covid-19. Walaupun banyak riset menunjukkan peran penting para pemimpin agama di tengah masyarakat, antara lain karena wibawa dan jaringan yang mereka miliki hingga ke tingkat akar rumput, pelibatan mereka dalam penanganan krisis akibat Covid-19 sangat minimal, apalagi jika dibandingkan dengan pelibatan pihak-pihak lain yang tidak selamanya perlu seperti tentara (Honna, 2020) atau bahkan makhluk yang disebut *influencer*, jika bukan *buzzer* sekalian (Hermawan, 2020). Beberapa analisis bahkan menyimpulkan bahwa alih-alih membangun solidaritas atas nama agama di depan ancaman pandemi, para pemimpin politik kita malah memanfaatkan kedaruratan akibat pandemi untuk tujuan-tujuan politik dan karenanya memperuncing polarisasi yang sudah ada di dalam masyarakat kita (Mietzner, 2020; Jaffrey, 2020). Ini kesempatan berharga yang tidak dimanfaatkan dengan baik (*missed opportunity*), karena hampir semua tokoh atau organisasi agama di tanah air memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah atau lembaga-lembaga resmi dunia seperti WHO bahwa Pandemi Covid-19 ini berbahaya. Bahkan pemimpin agama atau mubalig yang sering berseberangan dan mengecam pemerintah seperti Rizieq Shihab atau Abdul Somad, memiliki pandangan yang sama dan menganjurkan agar ibadah dilakukan di rumah saja, untuk menghindari kerumunan, setidaknya di awal-awal ketika ancaman pandemi mulai menyerang (IPAC, 2020).

## Mendengarkan Suara Perempuan

Dua di antara tiga kisah dalam video dokumenter kami menampilkan tokoh perempuan. Kami sengaja mengambil pilihan ini untuk menghadirkan yang tak ditampakkan serta sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada jasa-jasa mereka selama pandemi. Dalam kehidupan sehari-hari, peran pemeliharaan dan perawatan keluarga serta anggota komunitas yang sedang sakit senantiasa dihubungkan dengan peran perempuan. Namun, ketika tiba pada penggambarannya, peran itu tiba-tiba hilang terhapus oleh pencitraan peran tokoh yang umumnya lelaki, atau sebaliknya menjadi drama yang jauh dari realitas. Dengan video yang menghadirkan sedekat mungkin realitas ini, kami berharap bisa mendorong terus peningkatan partisipasi mereka dalam pengambilan kebijakan dan aktivisme masyarakat. Betapa kita sering melupakan peran krusial mereka ini—dan kita baru menyadarinya berkat ‘kegelapan’ akibat pandemi, setidaknya melalui tiga cara berikut ini.

*Pertama*, satu di antara cara pandemi ini mengubah wajah masyarakat kita adalah dengan mulai tumbuhnya kesadaran bahwa banyak sekali tenaga kesehatan di sekeliling kita berjenis kelamin perempuan. Ketika kita melihat atau berjumpa dengan dokter atau perawat, wajah-wajah merekalah yang umumnya kita temukan. Bagi saya pribadi, mungkin inilah salah satu hikmah di balik pandemi: tekanan Covid-19 mengharuskan kita untuk sering mendengar dan memperhatikan nasihat para tenaga kesehatan, bahkan berurusan langsung dengan mereka ketika kita terserang virus itu, dan dengan begitu kita lebih sering melihat wajah mereka dan menggantungkan harapan hidup kita kepada mereka.

*Kedua*, beberapa laporan terkait Covid-19 belakangan ini mengklaim bahwa perempuan adalah kelompok yang lebih menderita dan terbebani akibat pandemi Covid-19 dibanding laki-laki (UN Women, 2020; Wenham et al., 2020). Ini tidak dalam pengertian langsung bahwa virus lebih menyerang perempuan, tetapi melalui beberapa mekanisme yang memperlihatkan keterhubungan virus (sebagai penyakit) dengan peran dan status sosial kelompok manusia yang bergender perempuan. Covid-19 memang membatasi aktivitas semua orang dan mengharuskan mereka untuk tinggal di rumah, namun beban perempuan tetap lebih besar dibanding laki-laki karena urusan rumah tangga secara tradisional dan sosial dianggap merupakan urusan perempuan.

Jelas masih diperlukan riset yang lebih sistematis untuk mengerti masalah di atas secara lebih akurat. Namun, *common sense* saya mendukung klaim-klaim itu berdasarkan apa yang saya lihat, alami, dan obrolkan dengan banyak teman. Dari pengalaman saya sendiri saya tahu bahwa bagi kaum perempuan, beban mengurus rumah tangga menjadi lebih terasa jika satu keluarga memiliki anak bayi dan balita, anak yang sedang bersekolah atau anggota keluarga yang membutuhkan perawatan khusus seperti lansia. Beberapa adik dan kawan perempuan saya merasakan bagaimana Covid-19, tanpa pemberitahuan lebih dulu, memaksa mereka untuk menjadi seorang guru bahasa dan matematika, atau guru agama, sekaligus suster dan sekretaris, atau bahkan *office boy*, di rumah mereka sendiri. Saya kira pengalaman saya ini juga dialami banyak orang lain.

*Ketiga*, beberapa laporan baru-baru ini juga mulai mendokumentasikan bagaimana para pemimpin perempuan lebih berhasil dalam menanggapi krisis akibat Covid-19 (Horsford dan Jerlström, 2020). Memang diperlukan juga riset yang lebih sistematis untuk menelisik khusus aspek gender dalam penanganan krisis ini. Namun cukup banyak indikasi yang menunjukkan bahwa para pemimpin perempuan itu, misalnya di Selandia Baru dan Jerman, menawarkan cara mengkomunikasikan masalah secara lebih jelas dan transparan, dilengkapi dengan unsur empati yang kuat, dan tanpa disertai retorika yang memecah-belah. Mereka menjadi antitesis terhadap para pemimpin politik (laki-laki) seperti Donald Trump di Amerika Serikat, yang mengerdilkan nasihat sains mengenai ancaman Pandemi Covid-19, menolak pemakaian masker dan menjaga jarak, dan yang pernyataan-pernyataannya menyebarkan kebohongan nyata dan memecah-belah publik. Jika penanganan atas pandemi Covid-19 sering dianalogikan dengan 'perang', kata Horsford dan Jerlström, para pemimpin perempuan itu lebih suka menganalogikannya dengan 'maraton', yang memerlukan penanganan dengan perhitungan cermat, langkah-langkah terukur, dan didasarkan atas realitas besarnya masalah dan berorientasi berjangka panjang.

Sayangnya, meski sumbangan kelompok perempuan sangat penting di sektor kesehatan, apalagi di bawah tekanan pandemi seperti sekarang, suara mereka jauh dari kita dengar dan diterapkan dalam kebijakan dan intervensi terkait kesehatan. Ini ironis dan tragis. Di dunia, kata salah satu laporan, "Meski 70% tenaga pengelola kesehatan berjenis kelamin perempuan, namun hanya 25% pemimpin dunia yang perempuan." Farrar & Gupta (2020).

Di Indonesia, situasinya sama saja, jika bukan lebih buruk. Hal ini tampak misalnya ketika kita menyimak bagaimana pemerintah memimpin penanganan atas krisis pandemi ini. Pemerintah lebih mendahulukan maskulinitas otot (tentara) daripada sentuhan dan empati, dengan menempatkan seorang jenderal di garda terdepan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan perempuan hanya sebagai juru bicara (Laksmana & Taufika, 2020). Di tengah-tengah itu,

Komnas Perempuan (2020) berteriak karena kurang diperhatikannya kepentingan para perawat, yang 71% di antaranya perempuan, dan kuatir bahwa kebijakan bekerja dari rumah akibat Covid-19 akan meningkatkan jumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

### **Lebih Mengetahui ‘Yang Lain’, Melawan Disinformasi**

Video dokumenter kami juga sengaja menonjolkan aktivisme seorang perempuan keturunan Tionghoa, yang pernyataannya tentang kerja sama saya kutip di atas. Nama perempuan itu adalah Liem Liliyanti Lontoh. Sesudah selesai menjadi pengurus FKUB Jakarta Barat, sejak 2020 sampai sekarang, dia menjadi pengurus FKUB Provinsi DKI Jakarta. Sehari-hari, dia adalah Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu (Matakin) Provinsi DKI Jakarta sekaligus Ketua Hubungan Antar Lembaga dan Lintas Agama Matakin di tingkat pusat. Dalam gambar-gambar berjalan di video itu, dia jelas tampil sekaligus sebagai keturunan Tionghoa, beragama Konghucu, dan warga negara Indonesia yang aktif bergiat di forum lintas agama.

Kami sengaja menonjolkan peran ibu itu dalam video agar para penonton bisa ‘bertemu’ dengannya (lebih sering) dan dengan keragaman kelompok dan identitas yang secara simbolik diwakilinya. ‘Pertemuan’ itu menjadi lebih penting hari-hari ini, di tengah ancaman pandemi, karena meningkatnya tekanan dan ketakutan akibat pandemi bisa jadi diikuti oleh meningkatnya stigmatisasi dan bahkan aksi diskriminasi atas kelompok minoritas tertentu yang rentan dijadikan kambing hitam, seperti keturunan Tionghoa di Indonesia. Dalam sejarah, ancaman seperti pandemi tercatat sering menjadi *hotbeds* bagi penyebaran teori konspirasi dan pengkambinghitaman kelompok-kelompok minoritas (Eisner & Nivette, 2020: 7). Memang tidak ada yang otomatis di sini, dari stigmatisasi menuju diskriminasi dan aksi kekerasan, tetapi batas-batas yang kokoh pun bisa bobol juga karena peningkatan stigmatisasi juga bisa berlangsung melalui mobilisasi secara sengaja.

Masalah di atas menjadi lebih mendesak belakangan ini karena stigmatisasi itu bisa berlangsung melalui disinformasi daring yang makin mungkin karena tersedianya beragam *platform* media sosial. Sudah banyak laporan yang mendokumentasikan tentang bagaimana Presiden Donald Trump di Amerika Serikat menyebut Covid-19 sebagai ‘Virus Wuhan’ untuk mendiskreditkan Tiongkok, misalnya. Sementara itu, di India, disinformasi terkait Covid-19 telah menjadikan kaum muslim sebagai sasaran stigmatisasi dan diskriminasi, sekalipun jumlahnya sangat besar, yakni sekitar 140 juta jiwa.

Kekhawatiran bahwa tekanan Covid-19 akan meningkatkan stigmatisasi terhadap keturunan China di Indonesia sangat masuk akal karena sentimen anti-Tionghoa memiliki akar mendalam di sini, yang antara lain berujung pada kekerasan anti-Tionghoa di akhir pemerintahan Orde Baru (Purdey, 2006). Belakangan, setidaknya pada sebagian kelompok masyarakat Indonesia, sentimen di atas kembali menguat karena kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Gubernur DKI Jakarta, dan kerja sama pemerintahan Presiden Jokowi yang erat dengan pemerintahan Tiongkok. Dibanding kelompok-kelompok minoritas lain dan karena alasan-alasan politik, agama dan ekonomi, merekalah 'yang lain' yang paling rentan dijadikan sasaran kambing hitam di Indonesia.

Kita harus bersyukur bahwa disinformasi dan stigmatisasi yang dikhawatirkan di atas sejauh ini tidak terjadi. Tetapi hal ini sama sekali tidak menandakan bahwa bibit-bibit ke arah sana tidak ada, seperti pernah dilaporkan Alexandra (2020: 3) tentang seorang pedagang keturunan Tionghoa di Jakarta Utara yang justru menolak *panic buying*. Sikap itu kemudian menimbulkan kegaduhan publik di media-media sosial. Saya sendiri sering menemukan pesan-pesan sejenis dalam WhatsApp Group (WAG) yang saya ikuti, yang jumlahnya sebenarnya cukup terbatas, dengan isi berita hoaks dan disinformasi. Saya menduga bahwa pesan-pesan itu tidak memiliki daya pengaruh (*efficacy*) lebih jauh untuk alasan-alasan yang perlu dipelajari lebih teliti.

Dalam konteks ini dan lewat pesan yang disampaikan ibu keturunan Tionghoa dalam video di atas, kami ingin mengajak publik untuk mendiskusikan lebih jauh dua hal sekaligus. Dua hal ini terkait dengan bagaimana kita mendudukkan masalah disinformasi secara tepat sehingga kita juga dapat mengatasi dampak negatifnya secara efektif.

*Pertama*, apakah disinformasi pada dirinya sendiri merupakan faktor yang cukup untuk mendorong terjadinya kekerasan? Banyak riset yang terbit akhir-akhir ini menunjukkan bahwa hubungannya tidak selangsung itu (Arun, 2019). Riset kami sendiri, yang mempelajari kasus kekerasan dalam Pilkada Kalimantan Barat (2018) dengan kontestan dari etnis Dayak dan Melayu yang saling bersaing ketat, mengonfirmasi klaim ini: walaupun disinformasi berlangsung masif dalam semua tahapan Pilkada dan menysar semua wilayah di provinsi itu, kekerasan hanya terjadi pada tahap akhir penghitungan suara dan menarget hanya kelompok masyarakat tertentu di lokasi-lokasi tertentu. Kekerasan pemilu di sini mengambil bentuk migrasi sementara beberapa keluarga Melayu tertentu di beberapa titik kecil provinsi itu, karena mereka khawatir terhadap ancaman kekerasan oleh kelompok-kelompok Dayak yang kandidatnya kalah dalam pemilu (Rafsadie et al., 2020).

Dengan kata lain, agar disinformasi berkembang menjadi kekerasan, diperlukan adanya faktor-faktor lain yang 'menindakkanjuti' disinformasi itu dan membuka peluang bagi terjadinya kekerasan. Di titik-titik panas Kalimantan Barat di atas, faktor-faktor lain dimaksud adalah sejarah konflik kekerasan Melayu-Dayak dan pengabaian pemerintah untuk mengobati luka-luka lama yang masih menganga dan mudah diperhubungkan dengan perasaan tidak adil di masa kini. Akibat pengabaian ini, perjumpaan dan dialog di antara kelompok-kelompok yang dulu bertikai tidak terjadi dan ruang publik bersama tidak terbangun. Di sini, disinformasi lewat kanal-kanal media sosial mempertajam ketegangan dan polaritas yang sudah ada, berfungsi sebagai bensin yang menambah daya bakar rumput kering yang sebenarnya sudah tersedia.

*Kedua*, karena duduk perkaranya demikian, maka disinformasi itu sendiri bukanlah penyebab kekerasan. Kepanikan akibat disinformasi, atau rumor yang menyertainya, hanyalah gejala permukaan dari prasangka-prasangka yang tertanam lebih dalam, yang berakar pada ketakutan kepada kelompok-kelompok lain. Sebab-sebab yang lebih mengakar inilah yang harus diatasi oleh pemerintah dan masyarakat dengan memperbanyak dialog dan perjumpaan di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Dengan begitu, prasangka dan ketakutan kepada kelompok yang berbeda berkurang. Inilah yang kami coba lakukan dengan menonjolkan aktivisme perempuan keturunan Tionghoa dalam video dokumenter kami.

Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah untuk membatasi akses internet atau menutup kanal-kanal media sosial tertentu terlalu melebih-lebihkan peran media digital dalam terjadinya kekerasan. Hal itu hanya mengatasi gejala suatu penyakit dan bukan penyebab penyakit itu sendiri. Hal yang tertanam dalam memori adalah beredarnya prasangka dan ketakutan kepada kelompok lain yang berbeda yang dibiarkan sebagai bara. Seringkali konflik di masa lalu dibiarkan begitu saja tanpa ada penjelasan atau penyelesaian. Alhasil, setiap saat konflik itu bisa menjadi bensin penyulut bara di kemudian hari. Tidak tertutup juga kemungkinan bahwa kebijakan itu sengaja diterapkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, termasuk mengkritik pemerintah, dengan dalih mencegah terjadinya kekerasan (Hamid & Hermawan, 2020).

## Mendokumentasikan Kerja Sama

Selain karena alasan-alasan di atas, kami juga merekam kisah-kisah kerja sama lintas iman dalam video ini agar kami bisa mendokumentasikannya. Kisah-kisah seperti itu mungkin juga ada di tempat-tempat lain. Tetapi dengan sengaja mendokumentasikannya, kami juga sedang ‘mengabadikannya’ dan mengajak pihak-pihak lain untuk mencontohnya dan melipatgandakannya.

Penting sekali kita catat: solidaritas lintas iman itu, atau sebenarnya solidaritas apa pun, tidak otomatis berlangsung hanya karena adanya ancaman bersama (Weir, 2020). Hal itu harus sengaja diproduksi dan direproduksi lewat kerja-kerja bersama. Pengalaman umat manusia menghadapi berbagai jenis pandemi, dari yang besar hingga kecil, menunjukkan bahwa tersedianya kepemimpinan publik di tengah situasi kedaruratan selalu menjadi bibit tumbuhnya solidaritas-solidaritas baru—dan agar solidaritas ini terus bertahan, institusi-institusi baru perlu dikembangkan. Pandemi ini harus menjadi ‘portal’, meminjam istilah Arundhati Roy (2020), yang membawa kita ke gerbang solidaritas baru.

Dari segi ini, kami berharap video itu bisa menjadi pendorong berlangsungnya kerja-kerja kecil yang lebih banyak. Betapa sering kita mengabaikan capaian-capaian kecil meskipun kita tahu bahwa satu capaian besar adalah kumpulan dari capaian-capaian kecil. Kita sering mengabaikan kerja sama meski kita tahu bekerja bersama membuat segalanya menjadi lebih mudah dan murah. Kita terlalu sering didorong untuk bersaing dan berkompetisi, padahal Pancasila yang (konon) kita junjung tinggi itu, mengajarkan kita untuk bergotong royong.

Pengalaman kami dan Narasi memproduksi video ini menunjukkan bahwa tantangannya tidak kecil. Untungnya, tantangan ini bisa diatasi lagi-lagi berkat kerja sama: sementara Narasi ingin mengabarkan berita-berita baik terkait toleransi dan solidaritas, dan berita yang bisa mendatangkan kegembiraan, PUSAD Paramadina ingin agar hasil-hasil risetnya bisa diakses publik lebih luas melalui video dokumenter. Kami, PUSAD Paramadina dan Narasi, memilih untuk mengangkat kisah-kisah itu, bukan kisah-kisah lain seperti penolakan komunitas agama tertentu atas korban meninggal Covid-19, karena kami ingin ikut menyebarkan kegembiraan yang tumbuh karena meningkatnya solidaritas.

Tantangan pertama adalah menemukan *angle* (sudut spesifik) berita, yang harus terkait dengan aktor-aktor agama dan Covid-19 di Indonesia, bukan misalnya tentang sepak bola atau korupsi yang sedang ditangani kantor KPK. Penting diingat, ketika kami mendiskusikan soal *angle* ini, satu syarat yang harus dipenuhi adalah kemungkinannya untuk divisualisasi atau dijadikan bahasa gambar berjalan, yang membedakan teknologi video dari hanya audio. Kami akhirnya menemukan dan memilih ketiga kisah di atas berkat jaringan yang selama ini sudah PUSAD Paramadina bangun dengan teman-teman pegiat media di Ambon dan Maluku atau pegiat kerukunan di FKUB Jakarta.

Tantangan berikutnya adalah pengambilan gambar. Hal ini menjadi hambatan serius karena kami semua, termasuk para reporter Narasi, harus bekerja dari rumah. Lagi dan lagi, kerja-kerja kami dipermudah oleh adanya sikap saling percaya dan gotong royong, termasuk dari para narasumber. Pengambilan gambar testimoni bapak pendeta dan perawat muslim di Ambon dalam kisah ketiga di atas, misalnya, dilakukan sendiri-sendiri oleh yang bersangkutan, dibantu jaringan kami. Sementara itu, wawancara dilakukan secara jarak jauh, yang makin dimungkinkan oleh perkembangan teknologi.

Dengan bekerja sama, semuanya menjadi lebih mudah dan murah dilakukan, tanpa sedikit pun prinsip yang digadaikan. Tidak ada yang diperoleh dari kerja sama yang setara kecuali keuntungan bersama. Bayangkan jika Narasi harus mencari sumber-sumber cerita sendiri, tanpa dukungan riset-riset PUSAD Paramadina sebelumnya. Bayangkan pula jika PUSAD Paramadina harus membuat program televisi tersendiri, tanpa dukungan Narasi.

Sebagai lembaga riset dan advokasi dengan sumber daya terbatas, PUSAD Paramadina sengaja bermitra dengan sebanyak mungkin pihak, agar praktik-praktik baik yang kami temukan dalam riset bisa disebarluaskan ke pengambil kebijakan dan publik lebih luas. Sejak didirikan pada 2008, kami memang dibentuk dengan misi meningkatkan kapasitas negara dan masyarakat dalam memperkokoh kerukunan kita, dengan mempelajari dan menekankan peran positif agama dalam demokrasi.

### **Penutup: Memperlebar Ruang Publik**

Kami gembira bahwa upaya kecil kami sejauh ini cukup mendapat sambutan positif. Ini tampak misalnya ketika kami mendiskusikan video ini dengan beberapa komunitas di Jakarta, Bandung, Bogor, Tasikmalaya, Semarang, dan lain sebagainya. Pesertanya berasal dari mereka yang bergiat di FKUB dan Kementerian Agama, pemuda dan aktivis lintas iman, dan beberapa di antara mereka bahkan masuk ke dalam Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di daerah masing-masing.

Selain apresiasi, banyak komentar menyebutkan bahwa kisah-kisah seperti yang dimuat dalam video ini juga terjadi di tempat mereka. Komentar lain menyatakan bahwa kisah-kisah itu menginspirasi mereka.

Saran kami di penghujung pertemuan-pertemuan di atas selalu sama: mari rekam, sebar, dan bangun percakapan publik lebih luas. Dengan begitulah kita dapat memperkokoh demokrasi kita, karena demokrasi adalah sistem politik yang paling bergantung kepada partisipasi warga negara. Demokrasi, kata filsuf John Dewey, "Bukanlah alternatif terhadap prinsip-prinsip kehidupan bersama lainnya; demokrasi adalah gagasan tentang kehidupan komunitas itu sendiri." (via Robin, 2020).

Sudah sering media massa kita disudutkan karena mereka bukan mengabarkan berita, tetapi derita. Lebih buruk lagi, bahkan media arus utama mulai ikut dihujat karena menyebarkan hoaks dan disinformasi, dalam persaingan mereka dengan media sosial. Karenanya banyak orang mulai malas berurusan dengan media, karena *trust* mereka kepada media juga merosot. Dalam konteks hidup di bawah tekanan pandemi, hal ini sangat penting karena ketahanan tubuh dan mental kita amat bergantung kepada daya tahan.

Kawan-kawan pegiat media wajib merehabilitasi reputasi mereka di depan publik. Kami bukan ahli soal ini—dan di sini mungkin bukan tempatnya membahas soal itu. Tetapi mungkin salah satu caranya adalah dengan meyakinkan publik bahwa mereka berdaya, memiliki cukup *power*, untuk mengatasi masalah mereka sendiri, dengan atau tanpa bantuan negara. Kita jelas tetap perlu membaca berita tentang penderitaan, tetapi akan baik sekali jika hal itu dilengkapi dengan arah bagaimana kita bisa mengatasinya sendiri, dengan bersolidaritas dan bekerja sama, seperti ditunjukkan kisah-kisah dalam video ini.[] Jakarta, 30 Januari 2021.

## Sumber Rujukan

- Arun, Chinmayi. 2019. "On WhatsApp, Rumours, and Lynchings". *Economic & Political Weekly* 54 (6): 30-35.
- Alexandra, Lina. 2020. *The Other Battle of COVID-19: The Rise of Discriminative Attitudes*. CSIS Commentaries.
- Eisner, Manuel & Amy Nivette. 2020. "Violence and the Pandemic: Urgent Questions for Research. The Harry Frank Guggenheim Foundation Research and Policy in Brief." <https://www.hfg.org/pandemicviolence.htm>.
- Farrar, Jeremy & Geeta Rao Gupta. 2020. "Why we need women's leadership in the COVID-19 response". <https://www.weforum.org/agenda/2020/04/women-female-leadership-gender-coronavirus-covid19-response/>, (3 April 2020).
- Hamid, Usman & Ary Hermawan. 2020. "Indonesia's Shrinking Civic Space for Protests and Digital Activism. Carnegie Endowment for International Peace, Commentary". <https://carnegieendowment.org/2020/11/17/indonesia-s-shrinking-civic-space-for-protests-and-digital-activism-pub-83250>, (17 November 2020).
- Hermawan, Ary. 2020. "Politics of pandemics: How online "buzzers" infect Indonesia's democracy, jeopardize its citizens". *The Jakarta Post*, (21 March 2020).
- Horsford, Stephanie & Molly Jerlström. 2020. COVID-19: "Women's Leadership Sets the Example". <https://www.wilpf.org/covid-19-womens-leadership-sets-the-example/>, (12 Mei 2020).
- Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). 2020. "Religious "Super-Spreaders" in Indonesia: Managing the Risk of Stigmatisation." *IPAC Covid-19 Briefing* No. 4, (19 Mei 2020).
- Jaffrey, Sana. 2020. "Coronavirus Blunders in Indonesia Turn Crisis Into Catastrophe. Carnegie Endowment for International Peace, Commentary". <https://carnegieendowment.org/2020/04/29/coronavirus-blunders-in-indonesia-turn-crisis-into-catastrophe-pub-81684>, (29 April 2020)
- Komnas Perempuan. 2020. "Urgensi Perspektif HAM dengan Perhatian Khusus Pada Kerentanan Perempuan dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Pernyataan Sikap Komnas Perempuan". <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-nyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-urgensi-perspekt>, (26 Maret 2020)
- Laksmana, Evan A. & Rage Taufika. 2020. "How "militarized" is Indonesia's COVID-19 management?". *The Jakarta Post*, (27 Mei 2020).
- Mietzner, Marcus. 2020. "Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response". *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39: 227-249.

- Purdey, Jemma 2006. *Anti-Chinese Violence in Indonesia, 1996-1999*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Rafsadie, Irsyad, Dyah Ayu Kartika & Siswo Mulyartono. 2020. "Rumour, Identity and Violence in Contemporary Indonesia: Evidence from Elections in West Kalimantan". Dalam Thomas Power & Eve Warburton (eds.), *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?*, pp. 326-345. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Robin, Corey. 2020. "What People Power Looks Like in a Pandemic Democracy". *The New York Review of Books*.
- Roy, Arundhati. 2020. "The Pandemic is a Portal". *Financial Times*, (4 April 2020).
- Tim PUSAD Paramadina. 2020. "Meninjau Kembali Peraturan Bersama Menteri 2006 dan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama: Temuan dari Pangkalan Data. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD)". Laporan Riset. <https://www.paramadina-pusad.or.id/laporan-riset-fkub-kebijakan-pemeliharaan-kerukunan-di-indonesia/>.
- UN Women. 2020. *Whose Time to Care: Unpaid Care and Domestic Work during COVID-19*. Diakses dari <https://data.unwomen.org/publications/whose-time-care-unpaid-care-and-domestic-work-during-covid-19>, (25 November 2020).
- Weir, Margaret. 2020. "The Pandemic and the Production of Solidarity. Social Science Research Council". <https://items.ssrc.org/covid-19-and-the-social-sciences/democracy-and-pandemics/the-pandemic-and-the-production-of-solidarity/>, (28 Mei 2020)
- Wenham, Clare, Julia Smith & Rosemary Morgan. 2020. "COVID-19: The Gendered Impacts of the Outbreak". *The Lancet*, Vol. 395, pp. 846-848. Diakses dari [https://www.thelancet.com/article/S0140-6736\(20\)30526-2/fulltext](https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(20)30526-2/fulltext), (14 Maret 2020).